

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. R. (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Bendahara Desa Jlegiwinangun atas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Akhyar, A. A. (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Belanja Dana Desa di Desa Kabba dan Desa Panaikang*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*. Jakarta: Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
- Fatimah. (2021). *Apa Itu e-Billing Pajakku*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/601cd6365bddc138006e3148/Apa-Itu-e-Billing-Pajakku?/>.
- Harjowiryono, M. (2019). Analisis faktor- faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review*, 196-200.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Diakses tanggal 28 November 2021, dari djpb.kemenkeu.go.id: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/publikasi-cetak/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html>.

- Mahfudzoh, H. N. (2021). *Tinjauan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa atas Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sinomwidodo)*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas tuntas PPh potput penerapan aturan terbaru pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, D. (2021). *Tinjauan atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah Daerah Kabupaten Toba*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Soesanto, M. D. (2021). *Tinjauan atas Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah Kota Prabumulih*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.